

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 18 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen mengamanatkan pembentukan pemerintah daerah dan menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) menyebutkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, kabupaten, kota mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dalam undang-undang. Ayat (2) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan sendiri pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Ketentuan diatas menjadi dasar pembentukan undang-undang otonomi daerah yang dipakai untuk menyusun dan mengatur cara menyelenggarakan pemerintahan daerah, undang-undang otonomi daerah juga dipakai sebagai dasar pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya mengenai pelaksanaan otonomi daerah, seperti Peraturan Pemerintah, Perda Provinsi, Perda Kabupaten/Kota dan seterusnya sesuai dengan hierarki tata urutan peraturan perundang-undangan.¹

Otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas dan lebih besar mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dari daerah tersebut. Tujuannya yakni untuk lebih mendekatkan

¹Otonomia, *Dasar Hukum Otonomi Daerah*, dalam <http://otonomidaerah.com/category/dasar-hukum-otonomi-daerah/> diunduh Senin, 11 November 2013 pukul 22.00 WIB.

dan meningkatkan pelayanan yang optimal dan lebih baik kepada masyarakat, memudahkan masyarakat tingkat daerah untuk mengawasi pemerintahannya sendiri, dan dapat mengelola sumber daya daerah yang dimiliki daerah secara maksimal, terpadu berwawasan lingkungan dan terarah dan melibatkan peran masyarakat sekitar. Oleh karena itu dalam mewujudkan tujuan dari otonomi daerah maka dibuat peraturan perundang-undangan guna terwujudnya pelaksanaannya.²

Dengan diberlakukanya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah setiap daerah dituntut untuk siap menerima delegasi wewenang dari pemerintah pusat atau pemerintah di atasnya tidak hanya dalam penyelenggaraan pemerintahannya, tetapi juga dalam hal pemecahan permasalahan dan pendanaan kegiatan pembangunan. Artinya pemerintah daerah dituntut untuk melaksanakan fungsi-fungsi management yang lebih komperhensif, yaitu adanya keterkaitan proses antara perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pembangunan daerah yang berkesinambungan.³ Oleh karena itu negara/pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan harus menerapkan teori negara kesejahteraan kepada masyarakat.

Welfare state/negara kesejahteraan adalah negara yang pemerintahannya menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat. Konsekuensi logisnya tugas pemerintah tidak hanya sekedar mengatur masyarakat namun juga mensejahterakan masyarakatnya, dengan demikian

² Suharyanto dan Sutarto, 2007, *Pengelolaan Sumber Daya Air dalam Otonomi Daerah*, Yogyakarta : Andi, hal. 4.

³ *Ibid.*

pemerintah harus aktif berupaya untuk mensejahterakan rakyatnya. Agar pemerintah tidak sewenang-wenang dalam menjalankan fungsi dan tugasnya oleh karena itu harus ada pengawasan-pengawasan baik dari dalam maupun dari luar.⁴

Pokok peran pemerintah pada negara *welfare state* adalah bagaimana mewujudkan kesejahteraan umum bagi rakyatnya. Untuk itu pemerintah dengan berbekal *freis ermessen* akan menggunakan kebebasan atau kemerdekaan tersebut untuk turut serta dalam aktivitas sosial, politik maupun ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Apabila peran negara hanya mengutamakan kepentingan ekonomi semata, tanpa menjadikan kesejahteraan umum sebagai tujuan akhir akan menghasilkan pemerintahan yang kapitalistik.⁵ Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten di dalam memberikan segala bentuk perizinan nantinya harus memperhatikan aspek-aspek kesejahteraan rakyat.

Hukum perizinan bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, yang keberadaannya berguna dan tidak menimbulkan bahaya terhadap kehidupan. Apabila dalam aktivitasnya terdapat penyimpangan maka akan terdeteksi oleh publik secara melembaga dan tersedia mekanisme kontrol, serta pertanggungjawaban.⁶ Termasuk didalamnya sumber daya air, karena air menguasai hidup orang banyak sehingga dalam pengelolaan air harus ada kontrol masyarakat atau pemerintah melalui izinnya.

⁴Harun, 2012, *Kontruksi Perizinan Usaha Industri Prospektif*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 21.

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid.*, hal.35.

Air merupakan sumber daya yang sangat vital bagi setiap makhluk hidup. Seiring dengan laju pertumbuhan penduduk dan aktivitas manusia menjadikan kebutuhan air semakin meningkat.⁷ Oleh sebab itu kebutuhan air untuk masyarakat harus dapat memenuhi hak-hak setiap manusia itu sendiri, yang salah satunya pemenuhan hak atas air.

Jika semua pihak memahami bahwa sumber daya air adalah anugerah Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat bagi kesejahteraan dalam segala bidang. Air tidak dinikmati sekelompok orang saja. Hak atas air warga negara sama dimata hukum. Semestinya para pemimpin dan para pemangku kepentingan memahami prinsip-prinsip dasar pengelolaan sumber daya air.⁸

Kabupaten Klaten merupakan salah satu daerah yang kaya akan sumber daya air, hal ini dapat dilihat pada sektor pertanian. Para petani yang menanam tanamannya seperti padi, jagung, kedelai, cabe, sayuran, dll, selalu menghasilkan kualitas yang baik karena kandungan tanah dan air yang baik didaerah tersebut juga disebabkan sebagian wilayahnya terletak di kawasan lereng Gunung Merapi. Pada Kecamatan Polanharjo, Delanggu, Juwiring juga dikenal sebagai daerah sentra tani khususnya padi, yang terkenal dengan beras Delanggu.

Melalui analisa studi lingkungan ternyata air dari sumber si gedang, kapilaler dan cokro memiliki tipe yang sejenis yakni tipe vulkanik dari Gunung

⁷Suharyanto dan Sutarto, *Op.cit*, hal. 6.

⁸Kherjuli, *Kemarau Debit Airnya Melimpah Tapi Warga Sholat Minta Turun Hujan*, <http://kherjuli.wordpress.com/2014/02/16/kemarau-debit-airnya-berlimpah-tapi-warga-sholat-minta-turun-hujan/>, diakses Rabu, 11 Juni 2014 pukul 11.00 WIB

Merapi kemudian ditemukan lapisan lava yang memiliki air yang memiliki kandungan bagus dan tidak mengandung pasir. Lokasi titik itu yang menjadi sumber utama bagi pabrik PT Tirta Investama di Klaten.⁹

PT Tirta Investama mendirikan korporasinya pada tahun 2002 di wilayah Klaten tepatnya di Desa Wangen, Kecamatan Polanharjo. Setelah dilakukan penelitian di dekat mata air si gedang di Desa Pongkok, disanalah letak cekungan air tanah (CAT) sumber air yang melimpah yang nantinya akan diproduksi sebagai produk AMDK (Air Minum Dalam Kemasan) berlabel aqua melalui pengeboran air tanah. Hal tersebut dilakukan setelah memperoleh izin pemanfaatan air bawah tanah dari Pemerintah Kabupaten Klaten.

Izin pemanfaatan air tanah di Klaten dikeluarkan oleh Bupati Klaten setelah mendapatkan rekomendasi teknis dari Gubernur Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah.

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-undang No 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air menjadi peraturan dasar yang dipakai dalam pengelolaan sumber daya air ini, di dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 disebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Pemaknaan dikuasai negara diuraikan oleh hakim mahkamah konstitusi melalui permohonan nomor 008/PUU-III/2005 adalah rakyat secara kolektif

⁹Willysidharta, *Membangun Pabrik Baru dan Berburu*, dalam <http://willysidharta.blogspot.com/2006/12/membangun-pabrik-baru-dan-berburu.html> diakses pada hari Senin, 11 November 2013 pukul 22.00 wib

mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelandaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Karena air penting dan menguasai hajat hidup orang banyak maka dikuasai oleh negara.¹⁰ Begitu pula pada Pasal 3 Undang-undang No 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dijelaskan bahwa sumber daya air dikelola secara menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kenyataannya sekarang ini pada musim kemarau setelah berdirinya PT Tirta Investama menyebabkan kekeringan dan kesulitan mendapatkan air pada sawah-sawah milik petani dibagian hilir seperti Kecamatan Wonosari, Ceper, Pedan dan Karangdowo. Pada daerah tersebut yang dahulunya air melimpah untuk mengalir sawah sekarang harus mengeluarkan uang untuk membeli bensin yang dipakai menggerakkan diesel genset untuk memompa air (pompanisasi) dan yang kemudian dialirkan ke sawah-sawah.

Menurut Wening dalam Koran *Tempo*, pada tahun 2004, izin pengambilan air yang diberikan Pemda Klaten kepada PT Tirta Investama hanya 23 liter/detik tetapi pada kenyataannya PT Tirta Investama telah mengeksploitasi air hingga 35 liter/detik, menurutnya sudah tidak ada lagi keseimbangan antara jumlah keuntungan yang didapat PT Tirta Investama dengan kontribusi yang di sumbangkan PAD Pemkab Klaten sebesar Rp 1,5jt-3 juta perbulan. Tetapi PT Tirta Investama melalui humasnya Abdul Hadi

¹⁰ Aidul Fitriadi Azhari, 2013, *Handout Hukum Konstitusi*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

membantah kalau pihaknya melakukan eksploitasi sumber daya air berlebihan, menurutnya PT Tirta Investama melakukan pengambilan air sesuai izin yang dikantongi yakni 23 liter per detik.¹¹

Terkait dengan izin pemanfaatan air tanah PT Tirta Investama yang telah habis pada bulan Maret 2013 ini Pemerintah Kabupaten Klaten mengancam akan menolak perpanjangan izin, pasalnya PT Tirta Investama dinilai telah melanggar kesepakatan dengan pemda tentang pembagian armada angkutan. Seperti yang dimuat dalam harian *solopos*: Bupati Klaten, Sunarna, mengatakan 60% armada angkutan pabrik Aqua seharusnya diberikan kepada pengusaha Klaten. Sedangkan, 40% sisanya diserahkan kepada pabrik air minum kemasan itu. Menurutnya, hal itu sesuai dengan kesepakatan antara Pemkab dengan PT Tirta Investama beberapa tahun lalu. “Kesepakatannya sudah cukup lama, seharusnya 60 persen armada angkutan diserahkan kepada warga Klaten. Sedangkan 40 persen sisanya terserah mereka (PT TI). Tapi pada kenyataannya mayoritas malah dari luar (Klaten),” ungkap Sunarna Sabtu (9/11/2013).¹²

Apabila dilihat dari sumbangan retribusi daerah yang didapat oleh Pemerintah Kabupaten Klaten dengan pengambilan air yang dilakukan oleh PT Tirta Investama maka kurang sesuai dengan Pasal 3 Undang-undang No 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dijelaskan sumber daya air dikelola secara menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan

¹¹Tempo.co, Senin: 04 Oktober 2004, *Petani Klaten Ancam Gugat Produsen Aqua*, dalam <http://www.tempo.co/read/news/2004/10/04/05848909/Petani-Klaten-Ancam-Gugat-Produsen-Aqua> diakses 11 November 2013 pukul 22.00 wib

¹²Solopos, Minggu: 10 November 2013, *Bupati Klaten Ancam Tolak Perpanjangan Izin Aqua*, dalam <http://www.solopos.com/2013/11/10/dugaan-pelanggaran-mou-bupati-klaten-ancam-tolak-perpanjangan-izin-aqua-464044> diakses 28 November 2013 pukul 19.00 wib

mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Undang-undang mengamanatkan bahwa sumber daya air yang dikelola negara atau pemerintah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dengan menjaga kelestarian tidak menimbulkan dampak merusak lingkungan, akan tetapi bila eksploitasi pengambilan air secara besar dilakukan terus menerus tanpa menjaga keseimbangan dan kelestarian air itu sendiri tentu saja akan berdampak kekeringan dan kesulitan mendapatkan air terutama dibagian hilir serta dapat mematikan sumber mata air di dekat daerah yang dieksploitasi.

Adanya paparan tersebut timbul kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*, dalam Undang-undang No 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (*das sollen*) yang seharusnya air yang dikelola negara dipakai untuk kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya akan tetapi dalam kenyataannya (*das sein*) banyak rakyat khususnya petani di daerah hilir kesulitan mendapat air untuk irigasi sawahnya dan bagi Pemerintah Daerah Klaten sendiri kontribusi sumbangan yang diberikan PT Tirta Investama masih belum maksimal dalam pemasukan PAD dan kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERIZINAN PEMANFAATAN AIR TANAH OLEH PT TIRTA INVESTAMA DI KABUPATEN KLATEN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah mekanisme perizinan yang diberikan Pemerintah Daerah Klaten kepada PT Tirta Investama sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air?
2. Apakah tujuan pemberian izin pemanfaatan air tanah PT Tirta Investama di Kabupaten Klaten sudah sesuai dengan tujuan pengelolaan sumber daya air dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 berdasarkan PAD, konservasi sumber daya air, dan pemenuhan hak atas air?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui mekanisme perizinan yang diberikan Pemerintah Daerah Klaten kepada PT Tirta Investama telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
2. Untuk mengetahui tujuan pemberian izin pemanfaatan air tanah PT Tirta Investama di Kabupaten Klaten telah sesuai dengan tujuan pengelolaan sumber daya air dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 berdasarkan PAD, konservasi sumber daya air, dan pemenuhan hak atas air.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penulisan ini diharapkan tercapai :

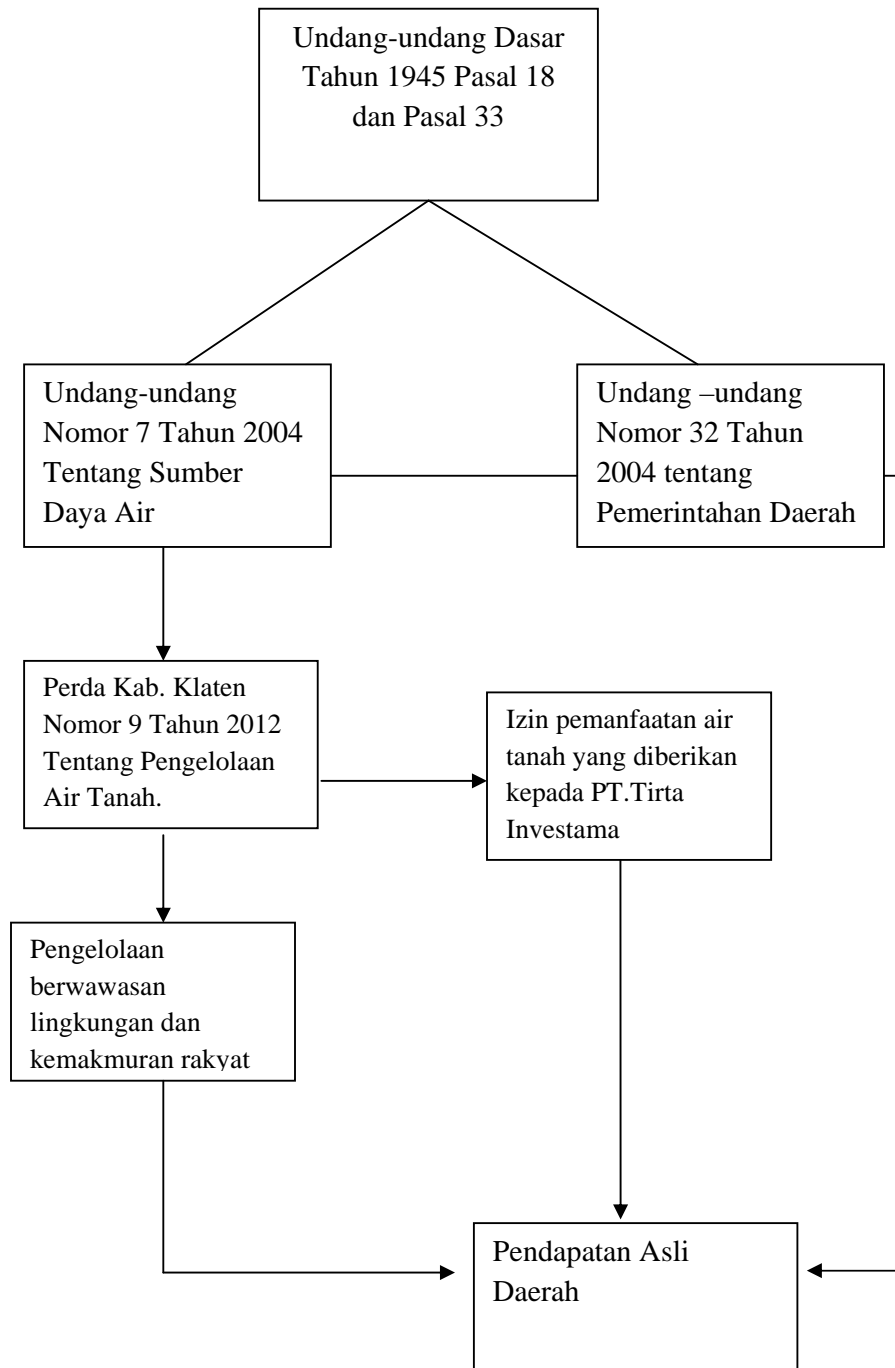
1. Manfaat Teoritis

- a) Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dibidang Hukum Administrasi Negara terkait dengan perizinan pemanfaatan air tanah dan lingkungan.
- b) Memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan, khususnya perizinan pemanfaatan air tanah dan lingkungan.

2. Manfaat Praktis

- a) Dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang berwenang dalam pemberian perizinan pemanfaatan air tanah.
- b) Memberikan jawaban dari permasalahan yang diteliti penulis serta dapat mengembangkan pola pikir, penalaran, dan pengetahuan penulis dalam menyusun suatu penulisan hukum.

E. Kerangka Pemikiran



Keterangan :

Kerangka pemikiran ini mencoba menggambarkan alur pikir penulis dalam mengangkat, menelaah, menggambarkan, dan menjabarkan serta menemukan jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian yang berjudul analisis yuridis terhadap perizinan pemanfaatan air tanah oleh PT Tirta Investama di Kabupaten Klaten.

Pemerintah daerah mempunyai wewenang dalam memberikan izin pemanfaatan air tanah kepada PT Tirta Investama sebagai produsen air minum dalam kemasan yang nantinya memberikan sumbangan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Klaten, akan tetapi dalam pemanfaatan air tersebut sesuai dengan amanat Pasal 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 yakni Sumber Daya Air dikelola secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

F. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu maka diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut

kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.¹³

Dalam melakukan penelitian agar terlaksana dengan maksimal maka penelitian menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan pendekatan metode yuridis empiris. Hal ini dikarenakan permasalahan yang coba diangkat penulis termasuk dalam konsep hukum yang bersifat normatif dan sosiologis, yaitu obyek kajiannya adalah hukum positif dan tingkah laku manusia.¹⁴

Dalam penelitian ini penulis akan meneliti Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang diterapkan dalam pemberian izin pemanfaatan air di Klaten dan sehingga dengan metode penelitian ini diketahui apakah mekanisme perizinan pemanfaatan air tanah telah sesuai dengan undang-undang tersebut dan pemberian izin tersebut sudah memenuhi tujuan mewujudkan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dilihat dalam PAD dan konservasi sumber daya air.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mencari data yang seteliti mungkin tentang

¹³ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hal. 42.

¹⁴ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 6.

manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah mempertegas teori-teori lama atau didalam penyusunan teori-teori baru.¹⁵

Dalam penelitian ini penulis menggambarkan mengenai bagaimana mekanisme perizinan pemanfaatan air tanah PT Tirta Investama di Klaten dan tujuan pemberian izin sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan tentang Perizinan Pemanfaatan Air Tanah.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kantor Pelayanan Terpadu Dinas Pekerjaan Umum, Bagian Perekonomian, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten dan PT Tirta Investama.

4. Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan langsung dari sumbernya yaitu diperoleh penulis dari wawancara langsung dengan informan, yakni dilakukan dengan pejabat atau petugas pada Kantor Pelayanan Terpadu, Dinas Pekerjaan Umum, Badan Lingkungan Hidup, Bagian Perekonomian Pemerintah Kabupaten Klaten dan PT Tirta Investama.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hal. 10.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari masyarakat melainkan dari dokumen, peraturan perundang-undangan, laporan, arsip, literature dan hasil penelitian lainnya yang mendukung sumber data primer.

Data sekunder terdiri atas :

1. Bahan hukum primer

Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah bahan hukum yang mengikat yakni meliputi:¹⁶

- a. Undang-undang Dasar Tahun 1945.
- b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- c. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
- d. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah.
- f. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah di Provinsi Jawa Tengah.
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Air Tanah.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Surabaya: Kencana Prenada, hal.181

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder digunakan untuk menjelaskan dari bahan hukum primer. Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder yang meliputi jurnal, literatur-literatur, buku, koran, laporan penelitian, dan sebagainya yang terkait dengan perizinan, otonomi daerah, pengelolaan air dan lingkungan hidup dan hak atas air.

3. Bahan hukum tersier

yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian dikenal adanya istilah teknik pengumpulan data yang berarti cara-cara yang dilakukan untuk memperoleh data. Untuk memperoleh data yang benar maka dalam hal ini dilakukan pengumpulan data dengan cara:

a. Studi Kepustakaan

Suatu metode untuk mengumpulkan data melalui dokumen-dokumen resmi, buku-buku, laporan, peraturan perundang-undangan, publikasi, dan kepustakaan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Studi Lapangan

Dalam penelitian lapangan ini adalah untuk memperoleh data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian. penulis terjun langsung ke lokasi penelitian dengan tujuan memperoleh data yang valid dan lengkap dengan mengadakan wawancara dengan pihak-pihak terkait di PT Tirta Investama, Kantor Pelayanan Terpadu, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, dan Bagian Perekonomian Kabupaten Klaten selaku pengelola izin.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah metode pendekatan kualitatif. Metode pendekatan kualitatif ini dilakukan dengan analisa data yang meliputi peraturan perundang-undangan, literatur serta ketentuan yang kaitannya dengan perizinan pemanfaatan air tanah kemudian dihubungkan dengan data dilapangan.

Data yang telah didapat tersebut kemudian dianalisa secara kualitatif setelah itu dilakukan pemecahan masalahnya serta kesimpulan untuk menjawab perumusan masalah.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum terdiri dari 4 (empat) bab, dimana tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan isi penulisan hukum ini. Sistem penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

BAB I adalah pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika skripsi.

BAB II adalah tinjauan pustaka yang akan memberikan kajian teoritis mengenai otonomi daerah, perizinan, prinsip HAM atas lingkungan yang baik dan sehat dan prinsip pembangunan berkelanjutan, pemanfaatan air tanah dan hak atas air.

BAB III adalah hasil penelitian dan pembahasan yang menguraikan tentang mekanisme perizinan pemanfaatan air tanah yang diberikan Pemerintah Daerah Klaten dan tujuan pemberian izin dilihat pada tujuan pengelolaan sumber daya air dalam kaitannya dengan keseimbangan antara pendapatan asli daerah (PAD), konservasi sumber daya air dan pemenuhan hak atas air.

BAB IV adalah penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian dan saran bagi pihak yang berkaitan dengan penulisan ini.